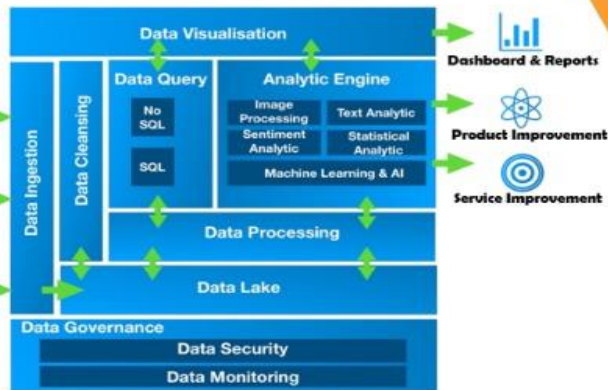




BIG DATA



SMART PROVINCE



RENCANA KERJA (RENJA) 2024

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

 Jl. Menteri Supeno 1/2 Semarang
 024 - 8319140
 diskominfo.jatengprov.go.id

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang, November 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**



RIENA RETNANINGRUM,SH

Pembina Utama Madya
NIP. 19641026 198909 2 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DISKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022	 II-6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.	14
2.3. Isu-Isu Penting, Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.....	II-15
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-22
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH..	III-23
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III-23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.	27
3.3. Manajemen Risiko Strategis Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.....	29
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH	 IV-333
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo Prov Jawa Tengah	IV-333
4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 .	60
 BAB V PENUTUP	 V-622

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun transisi pertama dimana RPJMD Tahun 2018-2023 telah berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Untuk itu, dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, kebijakan yang menjadi pedoman adalah RPD Tahun 2024-2026. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan dengan melihat hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis tahun 2022, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026. Sedangkan Renja Diskominfo Jawa Tengah merupakan penjabaran nyata dari komitmen instansi untuk mewujudkan visi daerah dan prioritas pembangunan nasional pada urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 yang diarahkan pada Tujuan “Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari”. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada: “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”. Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 salah satunya yaitu diprioritaskan pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 ini sejalan dengan salah satu prioritas kebijakan nasional yaitu percepatan transformasi digital di seluruh aspek pembangunan (RPJMN Tahun 2020-2024), khususnya optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, melalui: penuntasan infrastruktur TIK; pemanfaatan infrastruktur TIK, yaitu pemerintahan digital (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE; Satu

Data Indonesia/*Data Center*); layanan dasar berbasis digital; digitalisasi UMKM hingga ke level desa; dan pendukung atau *enabler* transformasi digital (keamanan siber dan pengembangan SDM TIK). Disisi lain peran komunikasi juga penting untuk memberikan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap semua informasi kebijakan sekaligus mencerdaskan masyarakat terhadap pesatnya perkembangan teknologi digital dalam pemerintahan.

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan fokus prioritas pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, khususnya melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik. Dalam rangka menjalankan prioritas pembangunan yang baik, bersih, efektif dan efisien, maka lini tugas pada bidang teknologi informasi dan komunikasi serta lainnya perlu untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah berperan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja pembangunan Jawa Tengah guna mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari melalui Peningkatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan persandingan antara prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 di atas, maka diperlukan upaya sistematis yang terencana melalui perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas urusan Kominfo, Statistik, dan Persandian guna mewujudkan peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Renja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tusi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Renja ini disusun melalui pelaksanaan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah serta *stakeholder* terkait dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan; pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD; penyusunan rancangan akhir; dan penetapan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
20. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0002965 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
21. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 050.23/0000031 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Serta Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050.24/2682 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan, maupun program perencanaan, keuangan (pagu indikatif) dalam menjalankan tupoksi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2. Tujuan

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2024 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Restra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah;
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Renstra 2024 – 2026 sebagai tahun pertama periode 2024 – 2026;
3. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informatika, persandian, statistik antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah mengacu sistematika sebagaimana pedoman dari Bappeda, yaitu:

BAB I Pendahuluan.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Diskominfo Prov Jawa Tengah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.
- 2.3. Isu-Isu Penting, Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.
- 3.3. Manajemen Risiko Strategis Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo Tahun 2024
- 4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 2024

BAB V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DISKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah

Evaluasi memuat *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun 2023, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. *Review* bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Hasil *review* tersebut dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Persandingan Program Prioritas Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Bidang Urusan	Program Prioritas Diskominfo	
		Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2	Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
3	Persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Diskominfo s/d Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2018-2023 (Renstra Perubahan)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	6	7	8	9
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	%	85	78	81	103,85
		Persentase Badan Publik Yang Terbuka	%	100	92	92	100
1.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Konten	240	186	186	100
		Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan	Kelompok	85	75	75	100
		Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum	Buah	240	186	186	100

		Keterbukaan Informasi Publik	Badan Publik	41	36	36	100
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	80	70	80	114,29
		Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan	%	85	70	70	100
2.1	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center	Titik	151	139	139	100
		Jumlah SKPD yang terintegrasi infrastruktur TIK	%	80	70	75	107,14
		Jumlah Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government	Dokumen	7	5	5	100
		Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi	%	80	70	80	114,29
		Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E-Government yang terintegrasi	%	80	70	70	100

2.2	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Sub Domain yang Aktif	%	100	80	80	100
URUSAN STATISTIK							
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan data sektoral	%	100	95	108	113,68
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang Tersedia	Jenis	18.000	15000	16205	108,03
		Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan HAM yang Tersedia	Jenis	23.000	21000	22687	108,03
URUSAN PERSANDIAN							
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Memiliki Keamanan Informasi >80%	%	100	66,67	70	104,99

1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi	%	80	75	75	100
1.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Layanan Penggunaan Jaring Komunikasi Sandi	%	80	72	72	100

Berdasarkan data pada tabel 2.2, dapat disimpulkan bahwa seluruh target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022 melampaui target kinerja dengan pencapaian rata - rata 100%. Capaian paling tinggi yaitu sebesar 114,29% pada indikator Pengelolaan Sistem Informasi yang Terintegrasi, sedangkan pada indikator Ketersediaan Data Sektoral sebesar 113,68%, serta pada capaian indikator PD yang Memiliki Keamanan Informasi >80% sebesar 104,99% dan Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik yaitu sebesar 103,85%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh instrumen pendukung kinerja program dan kegiatan yaitu : *Government Resource Management System (GRMS)* yang merupakan bangunan sistem aplikasi terintegrasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana sistem aplikasi ini terdiri atas sistem *e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-monev* dan *Government Planning Handbook (GPH)*, serta aplikasi *networking* yang terdiri atas *system cloud server, video/audio streaming, DNSX filter, voip gateway server, nms, ap controller, the dude* dan inventarisasi yang mulai diterapkan di Provinsi Jawa Tengah; Efisiensi penggunaan IT sesuai dengan alokasi anggaran; SOP Fasilitasi Liputan; SOP Fasilitasi Streaming; SOP Pusat Data; SOP *Disaster Recovery Plan (DRP)*; serta SDM yang optimal dimana PNS Diskominfo Provinsi Jawa Tengah sejumlah 100 orang PNS yang terdiri dari Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat (Humas), Statistisi, Sandiman dan Fungsional Umum.

Tabel 2.3.
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Diskominfo Provinsi Jawa Tengah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	%	85	87	102,35
		Persentase Badan Publik Yang Terbuka	%	100	100	100
1.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Konten	240	240	100
		Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan	Kelompok	85	85	100
		Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum	Buah	240	240	100

		Keterbukaan Informasi Publik	Badan Publik	41	41	100
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	80	90	112,50
		Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan	%	85	85	100
2.1	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center	Titik	151	151	100
		Jumlah SKPD yang terintegrasi infrastruktur TIK	%	80	85	106,25
		Jumlah Penerbitan Dokumen Tata Kelola E- Government	Dokumen	7	7	100
		Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi	%	80	85	106,25
		Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E-Government yang terintegrasi	%	80	80	100

2.2	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Sub Domain yang Aktif	%	100	100	100
URUSAN STATISTIK						
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan data sektoral	%	100	110	110
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang tersedia	Jenis	18000	19506	108,37
		Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan HAM yang tersedia	Jenis	23000	24034	104,50
URUSAN PERSANDIAN						
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Memiliki Keamanan Informasi >80%	%	100	102	102
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi	%	80	80	100
1.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Layanan Penggunaan Jaring Komunikasi Sandi	%	80	80	100

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2021 dan tahun 2022 TW III, capaian kinerja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra		Realisasi Capaian Th.2022	Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Th. 2022	Th. 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE			3,53	3,65	3,5	3,65	Th. 2022 hasil evaluasi <i>self assesment</i>
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE.			3,83	3,95	3,5	3,95	Th. 2022 hasil evaluasi <i>self assesment</i>
3	Indeks Domain Layanan SPBE.			4,17	4,30	3	4,30	Th. 2022 hasil evaluasi <i>self assesment</i>
4	Laju Pemanfaatan Data Sektoral.			81,76 %	95,65 %	85,70%	95,65%	Th. 2022 sudah melampaui target renstra
5	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).			2	3	3	3+	Th. 2022 sudah melampaui target renstra

2.2 Isu-Isu Penting, Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah

2.1.1. Isu-Isu Penting

- a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sebagai Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan.

SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dengan pengelolaan SPBE dapat mendukung transformasi digital terutama di sektor pemerintahan. Implementasi transformasi digital pada Diskominfo terdapat pada 4 bidang fasilitasi, yaitu: infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Pengembangan layanan publik dengan SPBE menjadi salah satu fokus kegiatan dalam menyukseskan 10 Program Prioritas Daerah, dimana SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun beberapa bentuk kegiatan pengembangan SPBE di Jawa Tengah yaitu melalui :

- 1) Pengembangan sistem informasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan;
- 2) Sistem tata naskah dinas elektronik (e-office);
- 3) Sistem pelayanan kepegawaian terpadu;
- 4) Sistem pelayanan masyarakat terintegrasi;
- 5) Sistem pelayanan pengaduan, dan didukung penguatan keamanan sistem informasi;
- 6) Kebijakan yang mewajibkan setiap perangkat daerah untuk mengembangkan 1 (satu) inovasi pelayanan publik dalam 1 (satu) tahun.

- b. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Suatu Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel.

Pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan proses kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dilakukan secara transparan. Sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan good governance yakni Badan Publik dapat menjalankan praktik praktik usaha yang sehat, serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Utama selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu di lingkup Provinsi Jawa Tengah agar senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki di setiap badan publik kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki Badan Publik. Disamping mempublikasikan informasi kepada masyarakat, Badan Publik juga dituntut untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dengan menyiapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

- c. Pelaksanaan Literasi Informasi Guna Mencegah Terjadinya Penyebarluasan Informasi yang Tidak Benar.

Maraknya isu radikalisme dan isu-isu yang tidak benar (hoax) di masyarakat merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Apalagi menuju gelaran Pemilu pada tahun 2024 ini. Isu radikalisme dan berita hoax seringkali membuat kegaduhan di masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak aman dan nyaman. Ideologi Pancasila sebagai pilar bangsa Indonesia yang menjadi petunjuk, pandangan hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila mempunyai nilai-nilai luhur yang komprehensif. Mulai lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat memicu tumbuh suburnya radikalisme di Indonesia yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diperlukan literasi informasi tentang penanaman dan pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat untuk meminimalisir radikalisme dan berita hoax dalam

masyarakat.

- d. Pengelolaan Data Terpadu dan Terintegrasi Sebagai Embrio Big Data Pemerintahan.

Meskipun pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi sudah begitu cepat, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. dengan hal ini terjadi karena data yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan seringkali kurang akurat, relevan dan uptodate. Sehingga dibutuhkan suatu pengelolaan data yang terpadu, akurat dan uptodate melalui Satu Data Jawa Tengah. Penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah perlu ditingkatkan agar pada akhirnya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal dengan memulai inisiasi pengelolaan Big Data dimana data yang dibutuhkan sangat besar, bervariasi dan selalu realtime. Pemprov Jawa Tengah merencanakan penggunaan Big Data untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat sehingga pelayanan publik kepada masyarakat lebih maksimal ke depannya.

- e. Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Yang Bertujuan Membangkitkan Potensi Masyarakat di Jawa Tengah.

Dengan supporting Teknologi Informasi diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi yang telah terbangun sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat di Jawa Tengah khususnya dalam menggali potensi-potensi ekonomi demi kesejahteraan.

- f. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE. Demikian juga pembentukan ekosistem Jawa Tengah Smart Province dimana pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting harus didukung dengan sistem keamanan informasi yang baik. Pengamanan informasi harus mampu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat sehingga mendukung peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah telah merencanakan

Making Indonesia 4.0 yang bertujuan menghasilkan kualitas output yang lebih tinggi di sektor industri dengan integrasi antara konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam 10 Prioritas Nasional Making Indonesia 4.0 terdapat beberapa layer diantaranya: *wearable tech*, *advance robotic*, *3D printing*, *AI*, dan *IoT*. Taktik dan strategi keamanan siber yang efektif sangat diperlukan sebab Indonesia menjadi negara nomor 3 yang paling rentan terhadap *malware*. Baik individu maupun organisasi dapat memulai kesadaran akan keamanan siber. Keamanan siber harus menjadi bagian dari perencanaan transformasi digital Indonesia. Mewujudkan kesadaran akan keamanan siber dapat dimulai dari diri sendiri. Hal yang paling sederhana adalah dengan memahami pemanfaatan *IoT* di sekitar untuk menjamin keamanan dari data dan privasi dunia maya sehingga perlindungan data pribadi juga dilaksanakan oleh para aparatur pemerintah daerah dan masyarakatnya serta juga oleh para penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi yang ada di dalamnya.

g. Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Digital

Perlu diakui bahwa di Indonesia, talenta digital yang menguasai pengelolaan teknologi informasi masih sangat minim. Kementerian Kominfo berupaya untuk mentransformasi kapasitas sumber daya manusia yang ada dengan mengadakan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas talenta digital. Sejalan dengan hal tersebut peningkatan kapasitas SDM digital mejadi prioritas dalam pembangunan Jawa Tengah baik dari segi pengelola teknologi informasi, komunikasi, data dan keamanan informasi.

2.1.2. Tantangan dan Peluang

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPD.

1. Tantangan:

- a. Tuntutan masyarakat dalam pelayanan yang lebih cepat, tepat, mudah dan murah.
- b. Penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah belum merata;

- c. Ketersediaan layanan internet untuk pemerintahan daerah dan masyarakat desa belum optimal;
- d. Pesatnya perkembangan TIK dalam era Revolusi Industri 4.0;
- e. Masih terbatasnya SDM yang mumpuni dalam pengelolaan digitalisasi pemerintahan;
- f. Kualitas data sektoral sebagai dasar dalam pengambilan keputusan belum optimal;
- g. Masih banyak badan publik di lingkup Provinsi Jawa Tengah yg belum terbuka;
- h. Meningkatnya serangan siber pada sistem milik Pemerintah;

2. Peluang:

- a. Kualitas pelayanan publik Jawa Tengah berbasis elektronik yang lebih baik semakin dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. Pandemi Covid-19 merubah gaya hidup masyarakat berikut kesadaran tentang pentingnya data dan digitalisasi;
- c. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan kualitas pembangunan Jawa Tengah;
- e. Pemangku kepentingan mempunyai kesadaran mengenai pentingnya keamanan informasi dalam pengelolaan teknologi informasi;
- f. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari hasil pencermatan internal ada perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah anggaran pada rancangan awal RKPD Tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA RP (.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	78	48.835.000	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	78	48.835.000
		Jawa Tengah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	81	4.500.000		Jawa Tengah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	81	4.500.000
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jawa Tengah	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	72%	26.532.500	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jawa Tengah	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	72%	26.532.500
		Jawa Tengah	Persentase Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi	24%	17.000.000		Jawa Tengah	Persentase Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi	24%	17.000.000
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jawa Tengah	Persentase Penyusunan Data Prioritas Pembangunan Daerah	24%	13.000.000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jawa Tengah	Persentase Penyusunan Data Prioritas Pembangunan Daerah	24%	13.000.000

4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jawa Tengah	Persentase Sistem Elektronik yang Telah Menerapkan Prinsip Manajemen Keamanan Informasi sejumlah 80%	25%	12.512.499	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Prinsip Manajemen Keamanan Informasi sejumlah 80%	25%	12.512.499
---	---	-------------	---	-----	------------	---	-------------	--	-----	------------

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil Forum Renja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, DPRD Provinsi Jawa Tengah selaku narasumber dalam forum menyampaikan paparan dan mengemukakan beberapa pokok pikiran pembangunan yang berkaitan dengan urusan kominfo, statistik dan persandian dalam 1 (satu) tahun mendatang antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Untuk Diskominfo
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

URUSAN KOMINFO	URUSAN STATISTIK	URUSAN PERSANDIAN
1. Pemerataan konektivitas broadband ke seluruh wilayah Jawa Tengah 2. Akselerasi kompetensi SDM mendukung ekonomi digital 3. Perbaikan layanan publik dan mempermudah birokrasi dengan digitalisasi 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital 5. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) 6. Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data 7. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data Jawa Tengah 8. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data	1. Melakukan pendataan secara berkala untuk mengetahui permasalahan yang menjadi hambatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah 2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas SDM pada diskominfo, agar semakin ahli dalam melakukan pendataan untuk mencapai target kesejahteraan	1. Selalu pantau celah keamanan yang timbul dan tutup setiap kali ada celah keamanan muncul; 2. Pengoptimalan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam administrasi pemerintahan.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan pada tabel 2.6 telah sinkron dengan prioritas pembangunan Jawa Tengah 2024 antara lain :

- 1) Satu Data Jawa Tengah, yaitu berupa integrasi portal data menuju implementasi Satu Data yang meliputi jumlah data, metadata, dan analisis statistik sektoral dan geospasial;
- 2) Data Center, yaitu berupa pengadaan perangkat pusat data dan server, serta telah menerapkan keamanan data melalui sertifikasi Tier III dan ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi sebagai upaya mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 3) Keamanan Informasi, yaitu berupa peningkatan pelayanan kemampuan dinamika keamanan informasi maupun peningkatan literasi digital dan SDM keamanan informasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Relevansi fokus kebijakan Pemerintah Pusat (K/L) dengan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pengaruhnya antara lain :

- 1) Pemanfaatan sumber daya infrastruktur dan manusia yang ada agar percepatan digitalisasi pemerintahan dapat terwujud sehingga selaras dengan program prioritas nasional;
- 2) Penguatan indeks SPBE harus tetap digaungkan dalam perencanaan Renja 2024 dalam rangka percepatan digitalisasi pemerintahan di daerah;
- 3) Rencana aksi Satu Data Indonesia tahun 2024 - 2025 yang telah disusun oleh pusat agar dipedomani dalam penyusunan rencana aksi Satu Data Jawa Tengah tahun 2024 - 2025 dengan leading sector di Bappeda sebagai sekretariat Satu Data Jawa Tengah;
- 4) Penyediaan 16 jenis layanan keamanan informasi yang ditujukan kepada Kepala Daerah dan wakilnya, OPD, pegawai dan aparatur sipil, serta pihak lainnya, sehingga Pemda perlu membentuk dan menyusun pedoman manajemen layanan keamanan informasi yang mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Relevansi Fokus Kebijakan Pemerintah Pusat (K/L) dengan Diskominfo Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2024-2026

KEMENKOMINFO	BSSN	BPS	DISKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH
1. Membangun infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan koneksifitas <i>broadband</i> di seluruh wilayah Indonesia; 2. Mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan yang didukung oleh sumberdaya manusia digital; 3. Memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas polhukhankam melalui akses informasi dan komunikasi publik; dan 4. Mempersiapkan masyarakat secara sosial dan budaya untuk memasuki dunia digital. 5. Menyinergikan Satu Data Indonesia (SDI) dengan SPBE; 6. Komponen portal SDI dan SKDN; 7. Mewujudkan <i>Smart Government</i> dengan penerapan penuh layanan digital publik dan administrasi pemerintahan nasional; dan pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial (<i>Data Driven Government</i>); 8. Dampak SDI dalam rangka perbaikan kualitas perencanaan pembangunan, konkritnya berupa data prioritas yang akan digunakan sebagai perencanaan pembangunan bukan hanya katalog data; 9. Data terkini atau <i>terupdate</i> akan meningkatkan kualitas program secara tepat sasaran. Dengan program yang tepat sasaran tersebut otomatis akan meningkatkan kualitas	1. Menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; 2. Meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi; dan 3. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.	1. Menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik; dan 2. Mewujudan Sistem Statistik Nasional dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/ departemen, lembaga internasional, negara asing, pemerintah daerah dan masyarakat luas, demi terwujudnya koordinasi statistik nasional secara terpadu.	1. Percepatan transformasi digital pemerintahan melalui peningkatan layanan sistem elektronik berbasis elektronik dan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi; 2. Peningkatan kualitas dan ketersediaan data sektoral dan geospasial; 3. Peningkatan penyelenggraan persandian dan keamanan informasi; 4. Peningkatan pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik; dan 5. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik.

pelayanan publik; 10. <i>Use Case Big Data Analytics</i> melalui 5 proses yaitu : 1) <i>Data Planning</i>; 2) <i>Data Preparation</i>; 3) <i>Analytics Modeling</i>; 4) <i>Data Story</i>; dan 5) <i>Policy Brief</i> 11. Perkembangan dan capaian implementasi SPBE (perlunya akselerasi implementasi menuju <i>smart government</i>)			
---	--	--	--

Arahan strategi kebijakan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain:

a) **Kemenkominfo:** Percepatan pengelolaan transformasi digital sebagai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan strategi:

1. Penguatan koordinasi antar instansi pusat, untuk percepatan penyelesaian target SPBE dalam **Rencana Induk dan Peta Rencana 2021-2025** melalui penyelarasan perencanaan dan penganggaran SPBE di K/L/D sebagai bagian program nasional, serta implementasi **Arsitektur SPBE Nasional** yang berbasis proses bisnis lintas sektor pemerintahan (*Government Enterprise Architecture*);
2. Penguatan peran Tim Koordinasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat menyelaraskan perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi K/L/D, agar dapat mewujudkan **layanan publik dan administrasi pemerintahan yang terintegrasi (digital services)**, **role model : Layanan Bantuan Pemerintah Terintegrasi dan Layanan Perizinan Pemerintah Terintegrasi**;
3. Percepatan terwujudnya sistem penghubung layanan pemerintah, sehingga terjadi **kolaborasi data** melalui penerapan manajemen data oleh seluruh wali data K/L/D dan **interoperabilitas antar sistem** yang sudah ada, menjadi layanan digital pemerintah yg terintegrasi (*Smart Government*);
4. Percepatan pemanfaatan transaksi elektronik pada setiap aspek layanan, termasuk penggunaan **Big Data Pemerintah dan Kecerdasan Artifisial**, sebagai bagian **Transformasi Digital Nasional**.

- b) **BSSN:** Penanganan ancaman siber untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, dengan strategi:

Strategi Preventif:

1. Penyelarasan Kebijakan dan Kegiatan dengan **Strategi Keamanan Siber Nasional**;
2. Melakukan pengujian keamanan secara berkala bagi sistem elektronik yang digunakan pada layanan publik;
3. Melakukan penilaian Tata Kelola keamanan siber;
4. Literasi keamanan siber pada pemangku kepentingan.

Strategi Proaktif dan Reaktif:

1. Penyusunan rencana kontigensi;
2. Pembentukan dan optimalisasi tugas Tim Tanggap Insiden Siber;
3. Melakukan pelaporan secara proaktif apabila terjadi insiden potensi ancaman keamanan siber.

Strategi Deterrent:

1. **Kolaborasi** dengan penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan kejahatan siber;
2. Membentuk **forum koordinasi** dengan pemangku kepentingan lain.

- c) **BPS:** Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia, dengan strategi:

1. Adanya uraian tujuan, target, indikator yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan baik tingkat daerah maupun tingkat pusat;
2. Mendukung kebijakan Perencanaan Pembangunan, SPBE, KSP, PDN, hasil keputusan Dewan Pengarah SDI dan isu strategis yang dilaksanakan oleh SDI;
3. Mendukung Daftar Data Prioritas yang dirumuskan Forum SDI tingkat pusat tahun 2020-2021 dari proses pengumpulan hingga penyebarluasan Data Prioritas termasuk Data Dana Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Dana Subsidi;
4. Program dan kegiatan yang akan dilakukan menerapkan prinsip-prinsip SDI yang meliputi standar data, metadata, kode referensi dan interoperabilitas data;
5. Program dan kegiatan yang dilakukan mendukung pemanfaatan data mengacu pada data prioritas daerah dan pusat;
6. Program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Aksi mendukung integrasi KRISNA dan SAKTI sesuai dengan kesepakatan Rapat Dewan Pengarah SDI;
7. Memastikan kolaborasi antar penyelenggara SDI dalam implementasi tata Kelola data dan pengelolaan standar kualitas data yang terdapat dalam Portal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan kinerja pembangunan yang akan dicapai oleh Diskominfo dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan selama Tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial;
- 3) Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah.

Penjabaran tujuan dan sasaran kinerja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,07
		1. Meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka	3,00
			Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	2,80
			Indeks Domain Manajemen SPBE	Angka	2,00
			Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	3,62
		2. Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial.	Laju Pemanfaatan Data Sektoral dan Geospasial Pembangunan Daerah	Persen	32
		3. Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Level	3+(636)
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	68

		1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	50
		2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78

3.3 Manajemen Risiko Strategis Diskominfo Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.3

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Operasional Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis Pd	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pd	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Ketidaksesuaian antara jadwal rencana kegiatan pada E-RKO dengan pelaksanaan kegiatan	12	Ketidakpatuhan pelaksana kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan pada E-RKO	Terjadi deviasi positif/negatif	- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil - Melaksanakan rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) secara rutin tiap awal bulan - Menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian berbasis Manajemen Risiko	Subbagian Program	Januari - Desember
2	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyampaian laporan keuangan belum lengkap	12	Ketidakpatuhan pelaksana kegiatan melaporkan SPJ keuangan	Laporan keuangan tidak dapat disajikan tepat waktu	- Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan bendahara setiap bidang dalam penyusunan laporan keuangan SKPD baik bulanan, triwulanan, semesteran, maupun akhir tahun	Subbagian Keuangan	Januari - Desember
3	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Terlambatnya proses pengadaan dan rentan terhadap kualitas spesifikasi pengadaan serta berpotensi timbulnya korupsi baik dari faktor administrasi ataupun fisik	12	Informasi dari TAPD tentang SE Sekda Prov. Jawa Tengah No.903/0018095 tgl 16 Nov 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-SKPKD& RBA-RSD TA 2023, untuk belanja seragam Khaki belum diperkenalkan, dan sampai dengan sekarang belum ada rambu yang mengatur tentang hal tersebut.	Keterlambatan serapan. Selama 4 Tahun pegawai tidak terfasilitasi seragam	- Peningkatan kompetensi pegawai atau pejabat pengadaan sesuai perkembangan peraturan dan kebutuhan instansi - Evaluasi proses pengadaan sesuai time schedule dan kesesuaian spesifikasi barang/jasa - Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Januari - Desember

No	Tujuan/Sasaran Strategis Pd	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pd	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	- Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan - Keterlambatan dalam proses lelang pekerjaan Rehab Gedung - Keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Rehab Gedung	12	Keterlambatan proses pencairan karena menunggu kelengkapan berkas administrasi pengadaan	Realisasi keuangan tertunda	- Koordinasi Intensif dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa selama proses pengadaan - Penyesuaian jadwal pekerjaan rehab dengan aktivitas kantor - Pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara intensif - Pengawasan terhadap jaminan pemeliharaan hasil pekerjaan	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Januari - Desember
5	Terwujudnya pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat	Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan	Dukungan pelaku kehumasan dan jurnalis kurang dalam memberikan informasi terkait Pemprov dan Jawa Tengah	12	- Kurangnya fasilitasi terhadap peningkatan kompetensi SDM - Kurangnya kolaborasi antara pemprov dengan stakeholder media/lembaga komunikasi/komunitas	- Kompetensi pelaku humas dan jurnalis kurang dalam memberikan informasi tentang Jawa Tengah - Publikasi terbatas dan kurang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat	Workshop Virtual atau pola hybrid secara berkala	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Januari - Desember
6	Terwujudnya pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Tidak ada model distribusi informasi yang intens seperti melalui dialog atau penggunaan media luar ruang agar mudah diingat masyarakat	12	1. Kurangnya koordinasi dengan media 2. Monitoring dan analisis berita belum optimal dilakukan.	Hoax dan sentiment negatif beredar luas mengakibatkan kepercayaan ke pemerintah menurun	Pengembangan aplikasi agar lebih kompleks dan mudah digunakan	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Januari - Desember
7	Tersusunnya data prioritas sebagai masukan penyusunan arah kebijakan	Persentase ketercapaian penyelenggaraan Big Data	Implementasi Satu Data Jawa Tengah kurang efektif	12	1. Kurangnya komitmen penyelenggara satu data maupun pengelola data sektoral 2. Belum adanya pedoman teknis dalam	Data dan informasi yang tersaji kurang valid	1. Meningkatkan kolaborasi yang efektif dan koordinasi intensif baik di internal maupun dengan eksternal 2. Penyusunan SOP/Pedoman pengelolaan data sektoral	Bidang Statistik	Januari - Desember

No	Tujuan/Sasaran Strategis Pd	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pd	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah 3. Kualifikasi dan jumlah SDM teknis kurang		3. Penguatan kapasitas Pengelola Data sektoral 4. Penguatan kapasitas Badan Publik terkait keterbukaan informasi publik		
8	Tersusunnya data prioritas sebagai masukan penyusunan arah kebijakan	Persentase ketercapaian penyelenggaraan Big Data	Portal Satu Data Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota tidak tersambung dengan Portal SDI Pusat	12	1. SDM pengelola kurang memadai 2. Pedoman pengelolaan portal belum ada	Data dan Informasi tidak terpublikasi sesuai peraturan yang berlaku	1. Pengusulan pembentukan tim teknis pengelola portal satu data 2. Peningkatan kapasitas SDM baik kompetensi maupun jumlah 3. Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Portal Data	Bidang Statistik	Januari - Desember
9	Meningkatnya layanan pemerintahan digital yang memperhatikan prinsip SMKI	Meningkatnya ketersediaan layanan yang menerapkan prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai	SDM Pengelola Persandian dan Pengamanan Informasi tidak kompeten	12	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat	SDM tidak dapat menerapkan keamanan informasi berbasis risiko terbaru terkait dengan keamanan informasi	Pelaksanaan Monev, Bimtek, Rakornis, FGD, dan Literasi Keamanan Informasi secara luring	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Januari - Desember
10	Meningkatnya layanan pemerintahan digital yang memperhatikan prinsip SMKI	Meningkatnya ketersediaan layanan yang menerapkan prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai	Aplikasi milik Pemprov Jawa Tengah tidak aman dan terdapat celah keamanan yang rentan diretas sehingga kredibilitas Sistem Informasi Pemprov Jawa Tengah menurun	16	Adanya celah kerawanan pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemprov Jawa Tengah	Kerusakan pada sistem informasi berupa defacement, penyisipan informasi ilegal	Pelaksanaan ITSA dengan BSSN	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Januari - Desember
11	Meningkatnya layanan pemerintahan digital yang memperhatikan prinsip SMKI	Perangkat daerah yang telah menggunakan jaringan komunikasi sandi	Pelayanan Jaring Komunikasi Sandi tidak optimal	12	Adanya kriteria keamanan dalam pembangunan sistem informasi yang tidak dilaksanakan,	Belum optimalnya pemanfaatan SE untuk mendukung Keamanan SPBE	Pelaksanaan sertifikasi Tenaga Ahli	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Januari - Desember

No	Tujuan/Sasaran Strategis Pd	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pd	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Terwujudnya layanan pemerintahan berbasis elektronik terintegrasi	Presentase aplikasi umum yang terkelola	Adanya sistem informasi yang tidak kompatibel dengan kebutuhan layanan	12	Terdapat aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh masing-masing OPD dengan tidak menggunakan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Diskominfo	Sistem informasi belum selaras Arsitektur Layanan SPBE	- Pemantauan aplikasi GRMS - Maintenance aplikasi GRMS - Penyelesaian kendala aplikasi secara real time - Penyusunan SOP dan dokumentasi complain handling untuk aplikasi GRMS - Penyusunan dokumentasi perubahan aplikasi pada aplikasi GRMS	Bidang E-Government	Januari - Desember
13	Tersedianya fasilitas teknologi informatika dan komunikasi	Tersedianya domain dan sub domain yang aktif	Adanya Domain pemerintahan / <i>government</i> yang tidak teregistrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	12	Keterlambatan dalam melakukan registrasi	Nama domain tidak dapat di akses	Kolaborasi dengan Bidang PDKI apabila terjadi hack pada domain Jawa Tengahprov	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Januari - Desember
14	Tersedianya fasilitas teknologi informatika dan komunikasi	Jumlah perangkat daerah yang terfasilitasi layanan pusat data	Adanya penambahan permintaan layanan <i>hosting/vps/colocation/backup</i> oleh SKPD dan Kab/Kota	12	SKPD, Kab/Kota belum memiliki server penyimpanan/server backup untuk aplikasi dan hosting	Layanan <i>hosting/vps/colocation/backup</i> tidak berjalan lancar	- Dibentuknya Tim Server dan jadwal jaga data center untuk monitoring kinerja server 1 x 24 jam/hari - Penunjukan PIC di masing-masing SKPD Prov dan Pemda Kab/Kota untuk fasilitasi permohonan <i>hosting/vps/colocation/backup</i> di data center - Pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana data center - Pemenuhan kekurangan sarana prasarana data center yang masih kurang	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Januari - Desember
15	Tersedianya fasilitas teknologi informatika dan komunikasi	Jumlah perangkat daerah yang terfasilitasi layanan pusat data	Adanya SKPD / UPT yang terputus alokasi internet dan layanan <i>data center</i>	12	Adanya kerusakan kabel jaringan <i>Fiber Optic</i>	OPD Tidak terfasilitasi akses internet dan layanan aplikasi data center	Monitoring, evaluasi dan pemetaan kendala teknis yang terjadi sehingga bisa segera dilakukan antisipasi teknis pembangunan FO	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Januari - Desember

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH

Diskominfo Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 mempunyai 4 (empat) urusan, 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) sub kegiatan. Sasaran Diskominfo Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Renstra 2024-2026 difokuskan pada lima (5) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial;
3. Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah;
5. Meningkatnya manajemen risiko Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo Prov. Jawa Tengah

Perencanaan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 68.474.872.000,-** (Enam puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Rumusan anggaran dan target program, kegiatan, dan sub kegiatan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Diskominfo Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,07	41.223.881.000	3,39	45.346.269.100	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jawa Tengah
	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Jawa Tengah *			Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) *	Angka	636	2.000.000.000	638	2.200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jawa Tengah
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI **	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Prinsip Manajemen Keamanan Informasi sejumlah 80% **	%	25	2.000.000.000	50	2.200.000.000	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.21.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi ***	Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai ***	%	20	1.040.000.000	50	1.144.000.000	SEKSI PENGAMANA N PERSANDIAN DAN INFORMASI	
		2.21.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi ****	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah ****	Dokumen	1	221.200.000	1	243.320.000	SEKSI PENGAMANA N PERSANDIAN DAN INFORMASI	
		2.21.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi ****	Jumlah SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi yang ditingkatkan kapasitasnya ****	Orang	100	283.500.000	240	311.850.000	SEKSI PENGAMANA N PERSANDIAN DAN INFORMASI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.21.02.1.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik ****	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi ****	Laporan	20	169.900.000	50	186.890.000	SEKSI PENGAMANA N PERSANDIAN DAN INFORMASI	
		2.21.02.1.01.04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi ****	80% Perangkat Daerah Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	%	20	365.400.000	50	401.940.000	SEKSI PENGAMAN AN PERSANDIA N DAN INFORMASI	
		2.21.02.1.02	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi ***	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Jaring Komunkasi Sandi***	%	25	960.000.000	50	1.056.000.000	SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.21.02.1.02.01	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi ****	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik melalui Jaring Komunikasi Sandi ****	%	30	960.000.000	60	1.056.000.000	SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH	
	Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah *			Indeks Domain Kebijakan SPBE	Angka	3	37.966.552.000	3,6	41.763.207.200	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jawa Tengah
				Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	2,8		3,2			
				Indeks Domain Manajemen SPBE *	Angka	2		2,36			
				Indeks Domain Layanan	Angka	3,62		3,81			
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA **	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi **	%	72	9.252.779.000	74	10.178.056.900	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.16.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ***	Tersedianya Domain dan SubDomain yang Aktif ***	Angka	1	5.490.000.000	0	6.039.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
		2.16.03.1.01.01	Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi ****	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi ****	Buah	1	15.000.000	1	16.500.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
		2.16.03.1.01.02	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi ****	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi ****	Dokumen	1	75.000.000	2	82.500.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
		2.16.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah ****	Jumlah Kapasitas Bandwidth(Mbps) ****	Angka	10000	5.400.000.000	15	5.940.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.16.03.1.02	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ***	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi layanan Pusat Data ***	OPD	41	3.273.279.000	41	3.600.606.900	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
		2.16.03.1.02.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah ****	Jumlah Server pada Pusat Data yang digunakan untuk sistem layanan terintegrasi ****	Buah	24	3.273.279.000	25	3.600.606.900	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
		2.16.03.1.02.08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah ****	Jumlah VPS atau Cloud Server yang terintegrasi dengan Pusat Data ****	Buah	135	-	138		SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
		2.16.03.1.02	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ***	Jumlah regulasi/SOP layanan Infrastruktur TIK ***	Dokumen	1	489.500.000	2	538.450.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	
		2.16.03.1.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik ****	Jumlah regulasi/SOP yang tersosialisasikan ****	Dokumen	1	289.500.000	2	318.450.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.16.03.1.02.10	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah ****	Jumlah SDM Pengelola Layanan Infrastruktur TIK ****	Orang	8	200.000.000	18	220.000.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA **	Persentase Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi **	%	15	4.190.000.000	47	4.609.000.000	Bidang E-Government	
		2.16.03.1.02	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ***	Persentase Aplikasi Umum yang Terkelola ***	%	24	3.190.000.000	48	3.509.000.000	SEKSI PENGEMBANG AN APLIKASI	
		2.16.03.1.02.07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik ****	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan atau Dikelola ****	Angka	10	3.190.000.000	20	3.509.000.000	SEKSI PENGEMBANG AN APLIKASI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.16.03.1.02	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ***	Persentase Dokumen Tata Kelola e-Government yang diterbitkan ***	%	30	700.000.000	70	770.000.000	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	
		2.16.03.1.02.01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi ****	Jumlah Dokumen Tata Kelola Teknologi Informasi yang Diterbitkan ****	Angka	5	700.000.000	15	770.000.000	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	
		2.16.03.1.02	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ***	Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government yang terintegrasi ***	%	15	300.000.000	50	330.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	
		2.16.03.1.02.09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas ****	Jumlah OPD atau Instansi yang mengimplementasikan inisiasi Smart Province sesuai Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas ****	Angka	10	300.000.000	25	330.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK **	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik **	Angka	78	22.140.773.000	79	24.354.850.300	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.16.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi ***	Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan ***	Kelompok	60	6.100.000.000	91	6.710.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik ****	Jumlah Komunitas yang diberdayakan ****	Kelompok	20	350.000.000	33	385.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas ****	Jumlah komunitas yang dikoordinasikan ****	Kelompok	40	5.750.000.000	58	6.325.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi ***	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan ***	Konten	170	10.120.000.000	260	11.132.000.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.16.02.1.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik ****	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan ****	Konten	25	2.015.500.000	42	2.217.050.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik ****	Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Internal ****	Konten	65	4.696.600.000	100	5.166.260.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media ****	Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Eksternal ****	Konten	40	823.910.000	52	906.301.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.08	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan ****	Jumlah Konten yang Dikerjasamakan Dengan Pemangku Kepentingan ****	Konten	40	2.583.990.000	66	2.842.389.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi ***	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum ***	Dokumen	173	5.920.773.000	260	6.512.850.300	SEKSI OPINI PUBLIK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.16.02.1.01.02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik ****	Jumlah rekomendasi analisis pendapat umum ****	Dokumen	80	751.327.000	125	826.459.700	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.03	Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah ****	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita ****	Dokumen	90	1.283.816.000	129	1.412.197.600	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.09	Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis ****	Jumlah rekomendasi analisis agenda publik ****	Dokumen	3	3.885.630.000	6	4.274.193.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK **	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	31	2.383.000.000	92	2.621.300.000		
		2.16.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi ***	Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif) ***	%	76	2.383.000.000	33	2.621.300.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.16.02.1.01.06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik ****	Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Dipublikasikan Badan Publik ****	Dokumen	82	583.000.000	83	641.300.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.11	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah ****	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi ****	%	86	1.800.000.000	87	1.980.000.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	
	Meningkatnya Pelayanan Data Statistik Sektoral dan Geospasial *			Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dan Geospasial Pembangunan Daerah *	%	32	1.257.329.000	64	1.383.061.900	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jawa Tengah
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL **	Persentase Penyusunan Data Prioritas Pembangunan Daerah **	%	24	1.257.329.000	48	1.383.061.900	Bidang Statistik	
		2.20.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi ***	Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi ***	%	30	502.000.000	64	552.200.000	SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.20.02.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi ****	Jumlah SDM yang mampu melakukan pengolahan data statistik dan geospasial ****	Angka	190	502.000.000	600	552.200.000	SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	
		2.20.02.1.01.05	Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur ****	Jumlah Infrastruktur Statistik yang Disediakan/Dikembangkan ****	Angka	0	-	6		SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	
		2.20.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi ***	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data ***	%	24	755.329.000	48	830.861.900	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
		2.20.02.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral ****	Jumlah Data Statistik Sektoral dan Geospasial yang terkumpul melalui Portal Data ****	Angka	50	197.500.000	100	217.250.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.20.02.1.01.03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral ****	Jumlah Metadata Statistik Sektoral dan Gespasial yang Dihimpun ****	Angka	40	253.000.000	80	278.300.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
		2.20.02.1.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral ****	Jumlah PD yang terlibat dalam pengukuran pembangunan statistik (IPS) ****	OPD	0	-	30		SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
		2.20.02.1.01.06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah ****	Jumlah Analisis Statistik Sektoral dan Geospasial ****	Angka	4	304.829.000	8	335.311.900	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah				Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	68	27.186.611.000	70	29.905.272.100	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah *			Indeks Manajemen Risiko *	Angka	3	650.000.000	53	715.000.000	Sekretariat	Jawa Tengah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **	%	100	650.000.000	100	715.000.000	Sekretariat	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ***	%	100	650.000.000	100	715.000.000	Sub Bag Program	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ****	Dokumen	5	450.000.000	5	495.000.000	Sub Bag Program	
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ****	Laporan	2	200.000.000	2	220.000.000	Sub Bag Program	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah *			Indeks Kepuasan Masyarakat *	Angka	78	26.536.611.000	79	29.190.272.100	Sekretariat	Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%	100	26.536.611.000	79	29.190.272.100	Sekretariat	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	1	20.486.611.000	0	22.535.272.100	Sub Bag Keuangan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****	Orang	115	20.004.611.000	125	22.005.072.100	Sub Bag Keuangan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	12	362.000.000	12	398.200.000	Sub Bag Keuangan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ****	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah ****	Dokumen	0	-	0		Sub Bag Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD ****	Jumlah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah ****	Laporan	1	40.000.000	1	44.000.000	Sub Bag Keuangan	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ****	Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah ****	Laporan	0	-	0		Sub Bag Keuangan	
			Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan ****	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan ****	Dokumen	2	40.000.000	2	44.000.000	Sub Bag Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD ****	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran perangkat daerah ****	Laporan	18	40.000.000	18	44.000.000	Sub Bag Keuangan	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran ***	Dokumen	3	215.000.000	4	236.500.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ****	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	25.000.000	1	27.500.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	185.000.000	1	203.500.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ****	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah, termasuk dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Laporan	2	5.000.000	2	5.500.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD ****	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	0	-	1		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran ***	%	100	174.380.000	100	249.760.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ****	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan ****	stel	111	64.380.000	222	128.760.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	1	15.000.000	2	16.500.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ****	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai ****	Dokumen	1	20.000.000	2	22.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ****	Orang	10	75.000.000	290	82.500.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ***	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran ***	%	100	891.200.000	100	980.320.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	15.000.000	1	16.500.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	4	80.000.000	4	88.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****	jumlah barang peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Buah	452	40.000.000	1	44.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	2	40.000.000	2	44.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ****	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	3	60.000.000	1	66.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	20	4.830.000	75	5.313.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu ****	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	75	99.500.000	150	109.450.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	100	511.870.000	200	563.057.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah ****	Laporan	1	10.000.000	1	11.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	30.000.000	1	33.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***	Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran ***	Unit	1	30.000.000	3	33.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan ****	Unit	0	-	0		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel ****	Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Paket	0	-	1		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit	0	-	0		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya ****	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan ****	Unit	1	30.000.000	2	33.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud ****	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan ****	Unit	0	-	1		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	0	-	1		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran ***	Laporan	4	3.930.800.000	5	4.323.880.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	1	10.000.000	1	11.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	1	1.261.000.000	1	1.387.100.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Laporan	1	19.800.000	1	21.780.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	5	2.640.000.000	5	2.904.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran ***	Unit	239	873.000.000	100	960.300.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	20	320.000.000	30	352.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel ****	Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	50	3.000.000	100	3.300.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	0	-	3		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ****	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara ****	Unit	0	-	0		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ****	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara ****	Unit	0	-	5		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi ****	Unit	2	410.000.000	5	451.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi ****	Unit	2	130.000.000	100	143.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi ****	Unit	2	10.000.000	4	11.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	

4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	- Indeks Domain Kebijakan SPBE - Indeks Domain Tata Kelola SPBE - Indeks Domain Manajemen - Indeks Domain Layanan SPBE	Pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi tidak optimal	16	- Masa transisi kebijakan dan regulasi yang sangat dinamis dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tentang SPBE; - Kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai;	Implementasi Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan tidak optimal sehingga berpengaruh terhadap ketercapaian penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	- Penyusunan Arsitektur SPBE; - Penyusunan Rapergub Juklak Perda Jawa Tengah Cerdas; - Penyusunan Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas; - Sosialisasi Pergub SPBE yang telah selesai ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2022 - Penyusunan Kepgub SK Tim Koordinasi SPBE Provinsi Jawa Tengah; - Penyusunan Kepgub GCIO (SPBE); - Telah ditetapkannya SK Sekda Arsitektur SPBE pada tanggal 4 Juli 2022, dan akan dilakukan pengkajian kembali sesuai amanat Perpres 95/2018 untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; - Telah ditetapkannya SK Sekda Peta Rencana SPBE yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2022, dan akan dikaji ulang; - Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dengan berbagai pendidikan dan pelatihan berbasis TIK;	Kepala Dinas	Januari - Desember
Meningkatnya Pelayanan Data Statistik Sektor dan Geospasial	Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektor dan Geospasial	Tidak tersedianya data statistik sektoral dan geospasial yang berkualitas sesuai	12	- Kurangnya komitmen terhadap penyediaan data sektoral dan	- Data sektoral dan geospasial blm bisa dimanfaatkan oleh pengguna data;	- FGD dalam rangka penajaman identifikasi ketersediaan dan kualitas data sektoral dan geospasial pada produsen data. - Peningkatan keterisian metadata data sektoral dan geospasial.	Kepala Dinas	Januari - Desember

	Pembangunan Daerah	dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia		geospasial yang berkualitas; - Kurangnya pemahaman tentang penyelenggaraan data sektoral sesuai dengan peraturan yang berlaku.	- Data sektoral kurang berkualitas; - Data sektoral sebagai basis data pembangunan kurang mendukung dalam perencanaan pembangunan, sehingga berdampak tidak tercapainya tujuan pembangunan;	- Peningkatan kapasitas SDM pengelola data sektoral dan geospasial		
Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Jawa Tengah	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Belum ada dasar hukum di internal Pemprov Jawa Tengah mengenai implementasi sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	12	Dasar Hukum mengenai Implementasi SMKI dalam proses pengkajian	Dengan belum adanya dasar hukum mengenai implementasi SMKI akan berdampak pada manajemen keamanan informasi	- Pengembangan aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik (MSE) milik Diskominfo Jawa Tengah - Follow up pendaftaran TTE untuk Eselon III - Pelaksanaan Monev, Bimtek, Rakornis, FGD, dan Literasi Keamanan Informasi secara luring - Pelaksanaan ITSA dengan BSSN - Pelaksanaan sertifikasi Tenaga Ahli	Kepala Dinas	Januari - Desember
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks MR Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Manajemen Risiko masih sekedar pemenuhan Dokumen	3	Kurangnya Komitmen Pemilik Risiko dalam menerapkan Manajemen Risiko	Entitas tidak dapat memitigasi Risiko yang dimiliki	Pemantauan penyelenggaraan Manajemen Risiko oleh Tim Satgas SPIP terintegrasi Diskominfo membangun sistem pengumpulan informasi kinerja yang mampu menyajikan data secara uptodate, terverifikasi antar unit kerja, dan dapat diperbandingkan antar taun, dan melakukan review dan evaluasi berkala atas indikator kinerja utama (IKU) yang dilaksanakan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi diskominfo, berbasis pada hasil penilaian Risiko, berpedoman pada regulasi, dengan pengawasan dan evaluasi dari atasan langsung bersama unit kepatuhan internal (UKI) untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian dimasing-masing unit kerja.	Kepala Dinas Kominfo	Januari - Desember
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hoaks tentang kebijakan yang terkait Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta diseminasi informasi yang tidak merata	3	Penyebarluasan informasi kurang merata diterima oleh masyarakat Jawa Tengah	Pelayanan publik yang tidak berjalan optimal			

BAB V PENUTUP

Penyusunan Renja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, didasarkan RKPD Tahun 2024 sebagai tahun pertama perencanaan pembangunan dan berbagai kebijakan umum pembangunan kominfo, persandian serta statistik dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu-isu strategis terutama dalam mendukung peningkatan pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbasis elektronik dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Renja Diskominfo tahun 2024 menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena menjadi tahun awal dalam perencanaan tiga tahun kedepan sesuai dengan Rencana Perangkat Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Dimana hal ini sejalan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 yang diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan SDM yang berkualitas. Diskominfo memfokuskan Renja pada rencana tindak lanjut program strategis di tahun 2024, antara lain:

1. Penyediaan *bandwith* untuk OPD Provinsi Jawa Tengah, sewa metro untuk Kabupaten/Kota, dan fasilitasi internet bagi 300 Desa di 29 Kabupaten dalam rangka mendukung penurunan PKE (Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem);
2. Penyediaan/fasilitasi dan pengelolaan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah (*Server, Storage, Cloud/VPS, dan Collocation*) dan Pemenuhan kebutuhan *Data Center Facilities Rated III*, serta Pemenuhan perangkat *mechanical electrical*;
3. Penyelenggaraan SPLP dari sisi aplikasi;
4. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektorial melalui Kerjasama dengan lembaga terkait baik pemerintah, perguruan tinggi, maupun non pemerintah
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektorial melalui kerjasama dengan lembaga terkait baik pemerintah, perguruan tinggi, maupun lembaga non pemerintah;
7. Menyediakan Sarana Prasana penunjang data sektorial dan spasial, termasuk di dalamnya adalah pengembangan unit produksi peta;
8. Penyelenggaraan otorisasi statistik sektorial di daerah melalui Data Analyst, Data Engineer, dan Data Scientist yang dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan forum data tematik maupun forum walidata daerah;
9. Melaksanakan pelayanan informasi publik berdasarkan hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

10. Penyusunan Regulasi terkait pengelolaan infrastruktur TIK dan Peningkatan SDM Pengelola Infrastruktur TIK;
11. Assesment Indeks KAMI yang fluktuatif dan dinamis, sehingga beberapa indikator komponen penilaian akan mengalami perubahan seperti ISO 27001 tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh BSSN.

Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini, sehingga target indikator kinerja program (*outcome*) yang diharapkan, dapat tercapai dengan dukungan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di internal Diskominfo beserta seluruh pemangku kepentingan terkait.